

---

---

**EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016-2018  
DENGAN MODEL CIPP (*CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT*)  
PADA PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN**

**A Rina Herawati<sup>1</sup>, Hasti Kusumawati<sup>2</sup>**

*Abstract*

*This research aims to investigate the quality implementation of financial reporting in Research Centre for Educational and Cultural Policies, Research and Development Agency, Ministry of Education and Culture, using CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. Focus of the problem researched is how to evaluate the financial reporting in Research Centre for Educational and Cultural Policies, Research and Development Agency, Ministry of Education and Culture. The descriptive methodology was used with qualitative approach. Data collection techniques were interview and document review. Research results are as follows: (1) Context Aspect is conformity between purpose and target in financial reporting in Centre for Policy Research with Government Regulation No. 71 Year 2010 concerning Standard for Government Accounting for the interests of accountability, management, transparency, and performance evaluation; (2) Input Aspect is resource in financial reporting, including human resource and facilities and infrastructure (computer, internet network, and office facilities) which have been adequate to support timely financial reporting; (3) Process Aspect is in the process of financial reporting implementation in which the problems found are late BMN reporting, BMN recording which is not orderly administration, the lack of coordination and communication among planner, executor, and application operator, the role of leader which is still inadequate, and SPI supervision which is not yet optimal; and (4) Product Aspect is financial statement in Research Centre for Educational and Cultural Policies which is relevant, reliable, and useful as source of information in management decision. Suggestions to be given are as follows: (1) Periodic coordination between stakeholders; (2) Intensive evaluation of employee performance in the process of financial reporting; (3) Suggesting SPI task as a supervisor in internal control as functional position; and (4) Recruiting more employees as administrator and operator in BMN application.*

**Keywords: *Evaluation; Financial Reporting; CIPP***

---

<sup>1</sup> Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Puslitjak Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

---

**PENDAHULUAN**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari wujud pelaksanaan *good governance*. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah membutuhkan peran penting informasi sebagai sarana komunikasi efektif dengan masyarakat sekitarnya. Pada kondisi tersebut, penyajian informasi yang utuh akan menciptakan transparansi dan selanjutnya akan mewujudkan akuntabilitas publik. Sebagai organisasi publik, pemerintah mengelola dana masyarakat untuk mencapai tujuannya. Untuk itu pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya melalui laporan keuangan. Pemerintah wajib memiliki dan melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu yang relevan dan andal. Pemerintah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Satuan kerja pemerintah dalam hal ini UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan Keuangan yang dibuat periodik semester I, semester III, dan tahunan.

Terkait pelaporan keuangan pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan nilai persediaan antara yang tertera dalam laporan keuangan dengan cek fisik berupa bukti pengeluaran atau tanda terima serta masih terlambatnya proses penyampaian data SIMAK BMN yang mengakibatkan terlambatnya proses rekonsiliasi pada satuan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) masih belum relevan dan andal di mana masih terjadi perbedaan data dengan dokumen sumber dan prosesnya tidak tepat waktu. Berdasar pada masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengenali berbagai faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan dari aspek konteks, input, proses, dan produk.

Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu komponen laporan keuangan yang disajikan meliputi jenis laporan dan elemen informasi yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangan seperti yang tercantum dalam kerangka konseptual PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memenuhi elemen

---

informasi, diperlukan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi yang disebut dengan karakteristik kualitatif.

Bastian (2010) mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik. Kualitas akuntansi sektor publik terdiri dari dua jenis kualitas yaitu kualitas utama atau pokok dan kualitas sekunder. Kualitas utama meliputi nilai relevan dan nilai andal. Relevan mengacu pada kemampuan informasi dalam laporan keuangan untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi sedangkan agar menjadi andal informasi harus dapat diuji, netral, dan disajikan dengan jujur.

Stufflebeam dalam Wirawan (2016) mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh (*obtaining*), dan menyediakan informasi yang berguna (*useful information*) untuk menilai alternatif-alternatif pembuatan keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan. Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi. Evaluasi *context* digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan “apa yang perlu dilakukan?”, evaluasi input digunakan untuk mencari jawaban apa yang harus dilakukan, evaluasi Proses digunakan untuk mencari jawaban apakah program sedang dilaksanakan, dan evaluasi product digunakan untuk mencari jawaban “apa manfaat dari program?”.

Setyabudi (2018) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan, yaitu proses konsolidasi laporan keuangan, peraturan penyusunan laporan keuangan, sumber daya manusia, karakteristik organisasi, pemeriksaan BPK, dan stakeholder laporan keuangan. Sesuai dengan hal tersebut aspek konteks terkait dengan tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam PP No.71 tahun 2010, aspek input terkait dengan sumber daya satuan kerja, aspek proses terkait dengan proses pelaporan keuangan seperti rekonsiliasi dan pengawasan pelaporan keuangan, dan aspek produk terkait dengan laporan keuangan yang dihasilkan beserta manfaatnya.

---

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan peraturan perundangan dan membandingkannya dengan kondisi pada objek penelitian. Lokus dalam penelitian ini adalah Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan pengembangan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan *key informant*. Data sekunder diperoleh dari telaah dokumen berupa peraturan perundangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Aspek Context****A. Hasil wawancara**

Sasaran pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dapat dibagi menjadi 2 berdasar kepentingannya, yaitu kepentingan internal dan eksternal. Sasaran berdasar kepentingan internal merujuk pada pihak instansi, baik di tingkat satuan kerja maupun eselon 1 terkait dengan kebutuhan untuk keperluan pemeriksaan keuangan dan manajemen demi mewujudkan tujuan Puslitjakdikbud sesuai dengan tujuan Balitbang dalam mencapai tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran berdasar kepentingan internal adalah pihak manajemen Puslitjakdikbud beserta pegawai dan pihak auditor yaitu Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sasaran berdasar kepentingan eksternal merujuk pada kesesuaian tujuan instansi dengan prioritas nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Nawacita. Sasaran berdasar kepentingan eksternal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan pelaporan keuangan Puslitjakdikbud adalah sebagai media bantu untuk manajemen dalam membuat keputusan terkait keputusan penganggaran di periode selanjutnya dengan mempertimbangkan informasi keuangan di periode sebelumnya. Pelaporan keuangan sebagai ukuran kinerja satuan kerja terkait dengan daya serap anggaran.

**B. Telaah Dokumen**

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan peranan pelaporan keuangan adalah:

## a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

## b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

## c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan dari pelaporan keuangan yang tercantum kerangka konseptual pada PP No.71 tahun 2010 adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Setiap peranan merujuk kepada pihak yang memperoleh manfaat dari pelaporan keuangan atau dalam hal ini sasaran dalam pelaporan keuangan. Akuntabilitas terkait dengan sasaran pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya satuan kerja. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya satuan kerja memiliki sasaran untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan yang ditujukan kepada lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas baik dari dalam atau luar instansi dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Puslitjakdikbud atas penggunaan APBN yang dilaporkan secara periodik dan tepat waktu kepada masyarakat umum maupun instansi pemerintah lainnya. Selain itu adanya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Manajemen terkait dengan sasaran laporan keuangan untuk kebutuhan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembuat keputusan di satuan kerja Laporan keuangan Puslitjakdikbud bermanfaat untuk para pembuat keputusan dalam hal ini manajemen untuk merancang anggaran periode selanjutnya dengan memperhatikan laporan keuangan periode sebelumnya. Transparansi terkait dengan sasaran informasi keuangan secara terbuka dan jujur, yaitu kepada masyarakat atas penggunaan dana APBN. Masyarakat memiliki aksesibilitas terhadap laporan keuangan instansi. Laporan keuangan Puslitjakdikbud dimuat dalam LAKIP meskipun hanya cuplikannya saja. Laporan keuangan tidak ditampilkan secara utuh hanya diambil bagian pada penyerapan anggaran. Keseimbangan antar generasi terkait dengan sasaran pengguna laporan keuangan untuk mengetahui potensi penerimaan satuan kerja. Puslitjakdikbud sebagai satuan kerja yang tidak memiliki Penerimaan Negara Bukan

---

Pajak sehingga laporan keuangan Puslitjakdikbud tidak memberikan informasi terkait penerimaan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen menunjukkan bahwa sasaran pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud sesuai sasaran yang ingin dituju terkait dengan peranan pelaporan keuangan yang tercantum dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu akuntabilitas, manajemen, dan transparansi, sementara keseimbangan antar generasi tidak sesuai. Pelaporan keuangan untuk kepentingan internal sesuai dengan peranannya dalam hal akuntabilitas, manajemen dan evaluasi kinerja di mana pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi yang dapat diperiksa kebenarannya oleh pihak yang berwenang dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat keputusan dalam periode selanjutnya. Pelaporan keuangan untuk kepentingan eksternal sesuai dengan peranannya dalam hal transparansi, di mana pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dapat diakses oleh pihak manapun terkait dengan kebutuhan arah kerja instansi. Puslitjakdikbud tidak memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga pelaporannya tidak memiliki peranan keseimbangan antar generasi.

Terkait dengan tujuan menunjukkan bahwa tujuan pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan yang tercantum dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu (1) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya (2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud dapat memberikan informasi kepada penggunanya terkait alokasi dan tingkat penyerapan anggaran selama periode berjalan sehingga informasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Puslitjakdikbud tidak memiliki PNPB sehingga tidak ada perencanaan pendapatan pada pos Laporan Realisasi Anggaran. Adapun realisasinya pada tahun 2018 dan 2017 terdapat nilai PNPB, nilai tersebut merupakan penerimaan kembali belanja pegawai dan dan belanja barang tahun anggaran yang lalu.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 023  
ESELON I : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 11  
WILAYAH/PROVINSI : INSTANSI PUSAT 0199  
SATUAN KERJA : PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN 690353

Kode Lap : LRA.F.5  
Tanggal : 25/10/20 3:47 PM  
Halaman : 1  
Pg ID : lap\_ka\_face\_satker\_komparatif --

NO	URAIAN	2018				2017			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	11,915,000	(11,915,000)	0	0	43,737,079	(43,737,079)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	11,915,000	(11,915,000)	0	0	43,737,079	(43,737,079)	0

Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja  
Sumber: LK Puslitjakdikbud Tahun 2018

## 2. Aspek Input

### A. Hasil Wawancara

Jumlah pegawai pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud relatif masih kurang. Hanya ada satu orang pegawai di setiap bagian keuangan. Hal ini akan menjadi kendala dalam pelaporan keuangan apabila pegawai yang bersangkutan berhalangan hadir. Untuk mengatasi pekerjaan yang belum selesai, bagian keuangan Puslitjakdikbud membuat keputusan untuk menyelesaikannya dengan ekstra waktu kerja. Penambahan waktu bekerja pegawai lebih dari 3 jam dan terus menerus akan berpengaruh pada kesehatan dan motivasi pegawai.

Kompetensi pegawai dalam pelaporan keuangan tergantung pada kemampuannya menguasai teknologi khususnya aplikasi keuangan. Pada saat ini setiap tahapan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi dalam rangka memberi kemudahan dalam bekerja yang efektif dan efisien. Kompetensi pegawai pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dalam menguasai aplikasi keuangan sudah terolong baik apabila ada *update* aplikasi maka pegawai yang bersangkutan ditugaskan untuk mengikuti pendidikan kilat.

Motivasi dan komitmen pegawai dalam bekerja khususnya dalam pelaporan keuangan berdasar pada tugas pokok dan fungsi pegawai tersebut yang terikat dalam perjanjian kinerja dan merupakan kesadaran diri dari masing-masing pegawai. Tetapi ada satu atau dua orang saja yang kurang berkomitmen atas apa yang menjadi tugasnya. Motivasi pegawai dalam bekerja bersumber pada pribadi pegawai tersebut atas apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.



---

Pelaksanaan tugas pelaporan keuangan yang dilaksanakan di Puslitjakkdikbud sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap pegawai, artinya sudah ada pembagian tugas yang jelas dan telah ditetapkan. Pembagian tugas pegawai belum didasarkan pada kompetensi atau latar belakang pendidikan yang dimiliki tetapi berdasar pada jenis jabatan yang tersedia. Pada pelaporan keuangan lebih diutamakan pada kebutuhan ketrampilan pegawai terkait penguasaan aplikasi keuangan. Rotasi pekerjaan adalah sebuah strategi untuk memindahkan atau menukarkan pekerjaan pegawai pada bidang yang sama. Tujuan dari rotasi ini adalah meningkatkan fleksibilitas pegawai sehingga pegawai dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan serta menghilangkan kejenuhan dalam bekerja. Rotasi pegawai keuangan selama tahun 2016-2018 belum dilakukan. Pegawai yang sama masih melakukan pekerjaan yang sama sehingga ketrampilan pada penguasaan aplikasi keuangan atau pengetahuan terkait masalah keuangan tertentu masih terbatas pada pegawai yang sama.

Insentif pegawai diperlukan untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja. Insentif dapat berupa materiil dan nonmateriil. Jawaban dua *key informant* menunjukkan bahwa yang diberikan kepada pegawai keuangan di Puslitjakkdikbud adalah dalam wujud materiil dan non materiil. Insentif materiil berupa tunjangan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan karena pegawai keuangan di Puslitjakkdikbud adalah pegawai negeri yang pembiayaannya menggunakan dana APBN, sedangkan insentif dalam bentuk materiil berupa kegiatan untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja. Insentif diberikan untuk meningkatkan kinerja serta produktivitas para pegawai. Insentif berupa tunjangan kinerja bagi pegawai negeri diberikan sesuai dengan PMK sehingga tidak ada pemberian insentif di luar hal tersebut. Pegawai akan mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan tingkat jabatannya. Besarnya persentase tunjangan kinerja diukur menggunakan kinerja tingkat Kementerian bukan berdasar pada kinerja individu atau satuan kerja sehingga masih terdapat pegawai yang kurang termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya karena beranggapan bagaimanapun dia bekerja kan mendapatkan tunjangan yang sama.

Pengelolaan keuangan negara merupakan proses bisnis yang tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Setiap tahapan pelaporan keuangan dilaksanakan berdasar peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Strategi yang dilakukan oleh satuan kerja adalah bagaimana melaksanakan tahapan pelaporan keuangan tanpa

---

melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dua informan tersebut sepakat menyatakan bahwa strategi utama dalam pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud adalah melaksanakannya tepat waktu dan taat aturan. Pelaporan keuangan memiliki periode lapor yang terbatas yang waktunya sudah ditentukan secara sepihak oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga apabila satuan kerja terlambat dalam pelaporan keuangan maka satuan kerja tersebut akan mendapat sanksi administratif. Untuk menghindari hal tersebut Puslitjakdikbud menerapkan strategi pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud sudah memadai. Sarana dan prasarana berupa ruang kantor, peralatan komputer, dan jaringan internet tergolong baru dan dapat diakses dengan cepat. Untuk menunjang motivasi pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sangat bergantung pada sarana dan bagaimana cara pengelolaannya. Fasilitas sarana dan prasarana perkantoran digunakan untuk memperlancar pekerjaan guna mencapai tujuan satuan kerja. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana kantor dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai dan memperlancar aktivitas kerja pegawai maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik yang melibatkan seluruh unsur pegawai yang ada sehingga sarana dan prasarana dipakai secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur penggunaannya.

#### B. Telaah Dokumen

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut PP No 71 Tahun 2010 ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan satuan entitas akuntansi yang pada gilirannya mungkin mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia dalam entitas atau satuan kerja berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyajian informasi laporan keuangan. Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas suatu entitas

---

disertai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. Laporan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari faktor sumber daya manusia dalam hal ini pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas didukung dengan sarana kantor yang lengkap dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan dapat disajikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen menunjukkan bahwa input yang terdiri dari sumber daya manusia dan sarana prasarana sudah mendukung dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud. Pada pelaporan keuangan saat ini, sistem kerjanya menggunakan aplikasi keuangan, sumber daya manusia yang ada sudah memiliki kompetensi untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Apabila ada *update* aplikasi keuangan terbaru, para penggunanya akan diikutsertakan dalam diklat untuk mempelajari aplikasi tersebut. Motivasi pegawai dalam bekerja adalah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya berdasar pada jabatan dan wewenang yang sudah diberikan. Insentif berupa tunjangan kinerja nilainya dipengaruhi pada kinerja pegawai secara keseluruhan sehingga bukan acuan motivasi pegawai pelaporan keuangan dalam bekerja, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mendukung dalam pelaporan keuangan yang tepat waktu.

### **3. Aspek *Process***

#### **3.1. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan**

##### **A. Hasil wawancara**

Rekonsiliasi internal pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud masih belum berjalan sesuai peraturan, hal ini disebabkan karena terlambatnya pencatatan transaksi khususnya pada pencatatan BMN karena data yang tidak lengkap, sedangkan pada rekonsiliasi eksternal pelaporan keuangan sudah sesuai jadwal meskipun di batas akhir waktu penutupan rekonsiliasi. Rekonsiliasi internal merupakan proses kerja yang dilaksanakan dengan cara menginput data keuangan dan data BMN menggunakan dua aplikasi yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama. Proses rekonsiliasi ini membutuhkan koordinasi antar operator aplikasi keuangan dan aplikasi BMN dan didukung ketersediaan data yang lengkap sehingga kelancaran proses kerja yang satu berpengaruh pada kelancaran proses kerja yang lain. Rekonsiliasi eksternal merupakan proses kerja yang dilaksanakan dengan cara menginput data keuangan dan data BMN menggunakan

---

aplikasi yang berbeda, yaitu aplikasi yang ada di satuan kerja dan aplikasi yang ada di KPPN untuk mendapatkan hasil yang sama. Rekonsiliasi eksternal dapat dilakukan jika sudah melaksanakan rekonsiliasi internal sehingga ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi internal berpengaruh pada ketepatan waktu rekonsiliasi eksternal.

Faktor yang mendukung pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud adalah sumber daya manusianya beserta sarana dan prasarannya seperti peralatan komputer dan fasilitas internet, sedangkan faktor lain yang mendukung pelaporan keuangan sesuai jadwal adalah apabila transaksi keuangan dilaksanakan secara tertib administrasi. Artinya modal yang dimiliki Puslitjakdikbud sudah dapat mendukung dalam kelancaran pelaporan keuangan tetapi pada pelaksanaan transaksi keuangan yang tidak tertib administrasi akan berakibat pada terlambatnya proses pelaporan keuangan.

Faktor yang menjadi kendala dalam pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dipengaruhi oleh pelaksana keuangan itu sendiri. Pelaporan keuangan di sektor pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kompetensi pejabat dan pelaksana perbendaharaan pada satuan kerja berpengaruh pada pemahaman mengenai pertanggungjawaban perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan yang baik. Pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni serta koordinasi yang intensif dalam pelaksanaannya sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud antara lain terkait pemahaman peraturan keuangan yang berbeda-beda, terbatasnya jumlah sumber daya manusia, dan kerja sama beserta komunikasi yang belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud masih sering terdapat temuan oleh pemeriksa dan tahapan pelaporan keuangan yang tidak sesuai jadwal.

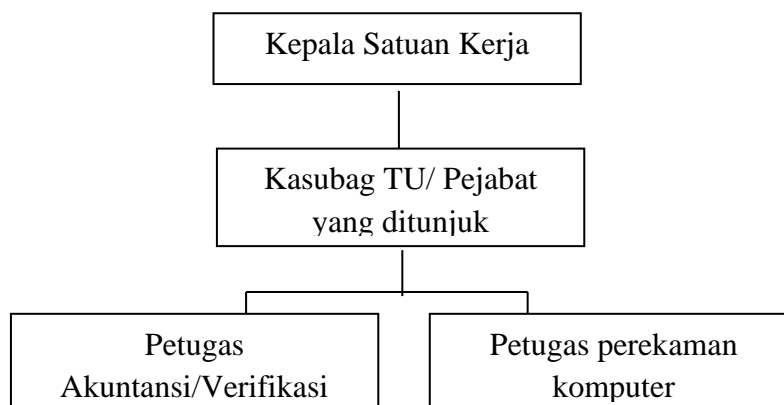
Peran pimpinan sangat penting dalam mempengaruhi jalannya kegiatan pelaporan keuangan. Pimpinan perlu membuat peraturan yang tegas terkait pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Peran pimpinan di Puslitjakdikbud masih kurang khususnya dalam pelaporan keuangan baik dalam sisi peraturan, koordinasi, komunikasi, dan ketegasan. Pimpinan hanya berfokus pada hasil akhir dari pelaporan keuangan tanpa memperhatikan prosesnya. Hal ini akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Evaluasi kinerja pegawai pada pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud belum dilaksanakan secara periodik. Evaluasi yang ada berupa penilaian sesuai laporan kinerja

pegawai dalam aplikasi eSKP. Tetapi dalam penilaian kinerja ini belum mempertimbangkan proses kerja dari setiap pegawai. Kinerja dinilai dari *output* yang dihasilkan tanpa memperhatikan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pelaporan keuangan terdiri dari proses bisnis yang saling mempengaruhi. Penyelesaian pekerjaan yang satu berpengaruh pada dimulainya pekerjaan yang lain.

#### B. Telaah Dokumen

PMK No. 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pasal 4 menyebutkan bahwa unit kompetensi bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dua di antaranya adalah menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPA akan dibantu oleh pegawai yang bertugas melakukan proses akuntansi/verifikasi dan petugas perekaman komputer. Berdasar pada PMK No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sumber: PMK No.177/PMK.05/Tahun 2015

Dalam melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tugas yang harus dilakukan oleh KPA adalah ;

1. Dokumen sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dikumpulkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.
2. Dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan termasuk pencocokan data/rekonsiliasi internal dilakukan dengan pihak internal terkait untuk menjamin keandalan data.

3. Dilakukan koordinasi dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan termasuk pencocokan data/rekonsiliasi eksternal dengan KPPN selaku UAKBUN Daerah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjamin keandalan data.
4. Prestasi kerja petugas pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dipantau dan dievaluasi.
5. Laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem ditandatangani.
6. Laporan Keuangan disusun berdasarkan hasil pemrosesan transaksi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen menunjukkan bahwa:

1. Dokumen sumber terkait pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud masih belum tertib administrasi dalam hal pengumpulan data BMN maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinasi belum dilakukan dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Puslitjakdikbud terkait dengan pencocokan data pada saat rekonsiliasi internal sehingga pada saat pelaksanaan rekonsiliasi internal tersebut masih ditemukan selisih pencatatan data antara data keuangan dan data persediaan/BMN.
3. Terkait dengan rekonsiliasi eksternal, prosedur yang dilakukan adalah mengunggah data hasil rekonsiliasi internal melalui aplikasi e-rekon KPPN. Hasil rekonsiliasi eksternal akan muncul secara otomatis pada aplikasi tersebut, dan apabila ada kesalahan satuan kerja diberi kesempatan untuk memperbaikinya dengan mengunggah ulang data baru. Rekonsiliasi eksternal antara Puslitjakdikbud dan KPPN Jakarta III telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. KPA atau manajemen Puslitjakdikbud belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap prestasi kerja petugas pelaksana sistem aplikasi sehingga masih sering terjadi permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang terus berulang dan belum melaksanakan monitoring dan evaluasi baik pada proses bisnis, pelaporan, dan aplikasinya.

---

### **3.2. Pengawasan Pelaporan Keuangan**

#### **A. Hasil wawancara**

Sistem pengendalian internal di Puslitjakdikbud dilaksanakan secara menyeluruh dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. SPI dilaksanakan sebagai pengawasan atas pelaporan keuangan sebelum dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak eksternal. Tim SPI melakukan pengawasan di Puslitjakdikbud dengan melakukan pemeriksaan pada bukti transaksi dan kebenaran atas bukti transaksi tersebut beserta ketaatannya pada peraturan. Apabila ditemukan transaksi yang tidak sesuai atau diragukan kebenarannya SPI bertugas untuk memberikan solusi bagi satuan kerja untuk memperbaiki transaksi tersebut. SPI bertugas mendampingi satuan kerja sampai dengan tindak lanjut satuan kerja atas temuan dari hasil pengawasan. Pelaksanaan tugas SPI terbentur pada status jabatannya yang bukan sebagai tugas utama pegawai sehingga dalam menjalankannya seringkali waktunya terbentur dengan tugas utama akibatnya pelaksanaan pengawasan dilakukan secara tidak optimal.

Secara umum bukti transaksi di Puslitjakdikbud sudah rapi dan memadai tetapi ada bagian yang belum sesuai dengan peraturan. Pengawasan seharusnya dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. SPI di Puslitjakdikbud melakukan pengawasan sampai dengan tahap pelaksanaan saja sehingga tahap penyusunan laporan keuangan masih kurang dalam pengawasan.

SPI berperan sebagai bagian dari upaya instansi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengawasi pengelolaan APBN sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. SPI bertugas untuk melakukan pengawasan dengan cara melakukan pengujian dan penilaian terhadap bukti transaksi yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Anggota SPI diangkat dan ditetapkan oleh KaBalitbang. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh SPI akan dilaporkan kepada KaBalitbang dan akan menjadi tindak lanjut yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh satuan kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh SPI sebagai langkah awal pemeriksaan sebelum dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal. Satuan kerja yang patuh untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut berpotensi semakin sedikit hasil temuan oleh pemeriksa eksternal. Namun dalam pelaksanaannya tugas SPI mengalami hambatan, yaitu terkait dengan status keberadaan SPI. SPI yang ada di Balitbang merupakan penugasan dari KaBalitbang bukan sebagai jabatan sehingga anggota SPI sehingga tugas sebagai SPI dilaksanakan jika tidak berbentrok dengan tugas sesuai jabatan. Oleh

---

karena itu, untuk meningkatkan sistem pengendalian intern di lingkungan Balitbang perlu melibatkan berbagai pihak tidak hanya bergantung pada anggota SPI saja.

#### B. Telaah Dokumen

Dalam Permendikbud No.44 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengendalian intern dilakukan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Satuan tugas pelaksana SPIP pada setiap satuan kerja atau yang disebut sebagai Satuan Pengawasan Intern dibentuk untuk melaksanakan tugas pengendalian intern. Sementara di tingkat Kementerian, pengendalian intern dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Berdasar pada Permendikbud No. 44 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kemendikbud menyebutkan bahwa Satuan Pengawas Intern (SPI) melaksanakan tugas berdasarkan pada pimpinan unit kerja dan berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh SPI dilaporkan kepada pimpinan unit kerja, dengan tembusan Inspektorat Jenderal. Dari peraturan ini dapat dilihat bahwa tugas SPI merupakan penugasan pimpinan unit kerja sehingga tugas SPI tersebut merupakan tugas tambahan bagi pegawai yang ditunjuk sebagai anggota SPI di luar tugas utama sesuai jabatannya.

Satuan Pengawasan Intern di Puslitjakkdikbud merupakan SPI Balitbang Kemendikbud di mana anggota SPI merupakan perwakilan satuan kerja di bawah Balitbang. Anggota SPI ditunjuk oleh Kepala Balitbang dan pembiayaan pelaksanaan tugas SPI Balitbang dibebankan pada anggaran Sekretariat Balitbang Kemendikbud. Hasil laporan pengawasan terhadap satuan kerja yang ada di Balitbang Kemendikbud diserahkan kepada Kepala Balitbang dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal. Kepala Balitbang akan memberikan respon terhadap hasil pengawasan satuan kerja untuk tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel dan handal.

Proses kerja pengawasan SPI antara lain apabila di Puslitjakkdikbud terdapat transaksi keuangan yang jujur dan lengkap dalam pelaporan keuangan maka SPI dan Kepala Balitbang akan memberikan apresiasi kepada satuan kerja atas hasil kerja yang dicapai, sedangkan apabila di Puslitjakkdikbud, dari hasil pengawasan mendapat temuan berupa transaksi keuangan yang tidak sesuai maka satuan kerja akan mendapat teguran dari Kepala Balitbang baik secara lisan ataupun tertulis. Atas hasil temuan tersebut, SPI



---

bertugas melakukan pendampingan kepada satuan kerja untuk memperbaiki transaksi keuangan tersebut, baik pencatatannya maupun kelengkapan dokumennya. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh SPI adalah untuk menghindari temuan dari pemeriksaan pihak eksternal dan mampu menghasilkan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan keuangan yang tertib administrasi dan peraturan sehingga tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas anggota SPI Balitbang belum optimal karena sering terbentur pada tugas utama sesuai jabatan terkait dengan masalah waktu. Status anggota SPI adalah penugasan bukan jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen menunjukkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengendalian intern di Puslitjakdikbud masih mengalami kendala yang mengakibatkan pelaksanaan pelaporan keuangan tidak tepat waktu, antara lain:

1. Terlambatnya pelaporan BMN yang mengakibatkan rekonsiliasi internal terlambat dan rekonsiliasi eksternal di akhir waktu.
2. Pencatatan BMN masih belum tertib administrasi dan banyak ditemukan data yang tidak lengkap.
3. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang kurang lancar antara perencana, pelaksana, dan operator aplikasi keuangan.

#### **4. Aspek *Product***

##### **A. Hasil wawancara**

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen Puslitjakdikbud. Dari laporan keuangan didapatkan informasi mengenai tingkat penyerapan dana Puslitjakdikbud baik dari sisi belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai. Sementara capaian *output* juga dapat memberikan informasi dari *output* mana yang kegiatannya sudah berjalan dan *output* mana yang masih belum berjalan untuk diketahui permasalahannya, sedangkan laporan keuangan bagi masyarakat dalam hal ini adalah pegawai Puslitjakdikbud belum memberikan manfaat karena pegawai Puslitjakdikbud masih belum memberi perhatian pada laporan keuangan. Informasi terkait keterserapan dana maupun posisi keuangan Puslitjakdikbud dinilai tidak begitu penting bagi pegawai. Laporan keuangan Puslitjakdikbud dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum. Hal ini selaras dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.

---

Laporan keuangan Puslitjakdikbud dapat diakses melalui *website* Balitbang meskipun tidak secara keseluruhan. Untuk laporan keuangan secara utuh dapat dilihat di buku laporan keuangan yang dicetak periodik.

#### B. Telaah Dokumen

Pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan harus memiliki unsur karakteristik kualitatif sehingga dapat memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Karakteristik kualitatif antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevan adalah laporan keuangan yang disajikan terdiri dari informasi yang memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Andal terkait pada penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Laporan keuangan juga dapat dibandingkan, baik antar periode akuntansi ataupun dengan laporan keuangan instansi lain. Laporan keuangan juga harus mampu dipahami oleh penggunanya baik dalam bentuk maupun istilah di dalamnya, dengan catatan pengguna paham atas kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja bersangkutan atau pengguna tidak tahu tetapi ada kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen tersebut, produk pelaporan keuangan Puslitjakdikbud berupa laporan keuangan sudah memberikan manfaat kepada penggunanya, yaitu manajemen yang digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan satuan kerja serta dalam rangka transparansi, laporan keuangan Puslitjakdikbud bisa diakses secara bebas oleh masyarakat umum. Informasi dalam laporan keuangan Puslitjakdikbud memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevan, yaitu laporan keuangan Puslitjakdikbud dapat memberikan informasi kepada manajemen terkait gambaran untuk memperbaiki perencanaan anggaran di periode berikutnya berdasar pada pelaksanaan anggaran yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Berdasar informasi tersebut manajemen membuat keputusan perencanaan anggaran dan dapat memprediksi waktu pelaksanaan kegiatan di periode berikutnya. Laporan keuangan Puslitjakdikbud dapat dibandingkan antar periode akuntansi dan dapat juga dibandingkan dengan laporan keuangan antar satuan kerja di Balitbang guna mengukur capaian kinerja keuangan satuan kerja di Balitbang. Laporan keuangan Puslitjakdikbud dapat dipahami baik bentuk maupun informasi di dalamnya karena mengikuti pedoman penyusunan laporan keuangan

---

pemerintah melalui aplikasi keuangan. Manajemen dapat memahami informasi yang dimaksud dalam laporan keuangan Puslitjakdikbud. Sebagai sarana akuntabilitas laporan keuangan Puslitjakdikbud juga diumumkan secara terbuka dengan cara menampilkannya di website Balitbang dalam Lakip. Masyarakat dapat mengakses informasi laporan keuangan secara bebas. Pegawai Puslitjakdikbud dalam hal ini mewakili masyarakat umum masih kurang berminat terhadap laporan keuangan sebagai salah satu wujud capaian kinerja satuan kerja Puslitjakdikbud. Jadi pengguna laporan keuangan Puslitjakdikbud masih terbatas pada lembaga pemeriksa, lembaga pengawas, manajemen, pemerintah, dan wakil rakyat. Masyarakat umum dalam hal ini diwakili oleh pegawai Puslitjakdikbud masih belum berminat sebagai pengguna laporan keuangan.

## **KESIMPULAN**

### **1. Aspek Context**

Pelaporan Keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek konteks dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada penggunanya terkait alokasi dan tingkat penyerapan anggaran selama periode berjalan sehingga informasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Dari pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dapat diketahui pula bahwa Puslitjakdikbud tidak memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sasaran dalam pelaporan keuangan Puslitjakdikbud dibedakan berdasar kepentingannya baik internal maupun eksternal. Untuk kepentingan internal pelaporan keuangan berperan dalam akuntabilitas, manajemen, dan evaluasi kinerja satuan kerja, sedangkan untuk kepentingan eksternal berperan pada transparansi.

### **2. Aspek Input**

Pelaporan Keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek input dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana yang ada. Input yang dimiliki Puslitjakdikbud meliputi sumber daya manusia, yaitu pegawai dan sarana prasarana perkantoran. Sumber daya manusia yang menunjang dalam pelaporan keuangan tergantung pada kompetensinya dalam menguasai aplikasi karena sistem kerja keuangan pemerintah pada masa sekarang menggunakan sistem aplikasi. Adanya *update* aplikasi keuangan secara berkala menuntut pegawai untuk

---

menguasai aplikasi baru. Untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menguasai aplikasi tersebut, pegawai ditugaskan untuk mengikuti pendidikan kilat. Jumlah pegawai yang menguasai aplikasi keuangan terbatas sehingga lancarnya pelaksanaan pelaporan keuangan tergantung pada kehadiran pegawai tersebut. Selain itu untuk menyelesaikan pekerjaan pada periode tertentu contohnya pada saat batas akhir pertanggungjawaban, pegawai membutuhkan tambahan waktu. Sarana prasarana yang dimiliki Puslitjakkdikbud terkait dengan fasilitas kantor dalam mendukung lancarnya pelaporan keuangan. Fasilitas kantor berupa tempat kerja, peralatan komputer, dan jasa internet dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan oleh pegawai. Jadi kesimpulannya sumber daya manusia atau pegawai dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Puslitjakkdikbud sudah menunjang dalam penyajian laporan keuangan yang tepat waktu meskipun terkendala pada terbatasnya jumlah pegawai yang kompeten.

### **3. Aspek *Process***

Pelaporan keuangan di Puslitjakkdikbud dilihat dari aspek proses dapat disimpulkan sebagai berikut:

Unsur dalam proses pelaporan keuangan di Puslitjakkdikbud meliputi kegiatan rekonsiliasi keuangan dan BMN, koordinasi antar pegawai, peran pemimpin dalam menyelesaikan masalah, ketaatan pada peraturan, dan hasil pengawasannya baik atau tidak terjadi penyimpangan. Rekonsiliasi keuangan dan BMN di Puslitjakkdikbud melalui 2 tahapan, yaitu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Pada tahap rekonsiliasi internal belum berjalan sesuai dengan peraturan. Hal ini disebabkan karena terlambatnya pencatatan transaksi khususnya pada pencatatan BMN karena data yang tidak lengkap, sedangkan pada rekonsiliasi eksternal pelaporan keuangan sudah sesuai jadwal meskipun di batas akhir waktu penutupan. Koordinasi pegawai dalam pelaporan keuangan dinilai masih kurang. Terlambatnya pencatatan transaksi BMN disebabkan kurang koordinasi antara pelaksana belanja dan operator aplikasi SIMAK BMN untuk mencatat barang yang masuk, sedangkan untuk barang yang keluar atau digunakan juga tidak dikoordinasikan dengan baik. Bahkan tidak ada pegawai yang bertugas melakukan pencatatan barang keluar sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan BMN di Puslitjakkdikbud masih belum tertib administrasi dan berdampak pada ketepatan waktu pada pelaporan keuangan secara keseluruhan. Peran pimpinan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi juga masih kurang. Rapat evaluasi maupun koordinasi dalam pelaporan keuangan

Puslitjakdikbud jarang dilakukan bahkan tidak pernah dilakukan sehingga hal ini berdampak pada kesalahan yang terus berulang terutama pada pencatatan BMN. Pengelolaan keuangan di Puslitjakdikbud secara umum sudah mematuhi Peraturan Menteri Keuangan, hanya bermasalah pada ketepatan waktu pelaporan keuangan dan tidak tertib administrasi. Tujuan pengawasan yang dilakukan Satuan Pengawas Internal adalah untuk menghindari temuan dari pemeriksaan pihak eksternal dan mampu menghasilkan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan keuangan yang tertib administrasi dan peraturan. Masih adanya temuan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan pada pelaporan keuangan Puslitjakdikbud menunjukkan tidak optimalnya Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan karena tugas SPI bukan tugas utama pegawai melainkan tugas tambahan dari Kepala Balitbang sehingga ketika anggota SPI melaksanakan tugas, waktunya bersamaan dengan tugas utamanya maka akan memprioritaskan tugas utamanya terlebih dahulu.

#### **4. Aspek *Product***

Pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud dilihat dari aspek produk dapat disimpulkan sebagai berikut:

Produk pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud meliputi laporan keuangan dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan Puslitjakdikbud sudah dapat dinilai relevan dan andal di mana informasi di dalamnya sudah digunakan manajemen untuk membuat keputusan. Laporan keuangan di Puslitjakdikbud digunakan untuk kebutuhan manajemen terkait perencanaan anggaran dan penyusunan kegiatan tahun berikutnya serta evaluasi kinerja dalam hal penyerapan anggaran. Di Puslitjakdikbud dibutuhkan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang-bidang dan didukung oleh layanan perkantoran yang ada di Puslitjakdikbud. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran pada kegiatan yang efektif untuk dilaksanakan pada periode berikutnya. Sementara itu pegawai belum memberikan perhatian pada laporan keuangan di Puslitjakdikbud. Pegawai hanya berfokus pada pertanggungjawaban atas penggunaan dana penelitian yang dilaksanakannya. Kesimpulan untuk produk laporan keuangan di Puslitjakdikbud adalah laporan keuangan bermanfaat untuk keperluan keputusan manajemen terkait penganggaran dan evaluasi kinerja tetapi belum bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini pegawai, sebagai sarana akuntabilitas instansi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui pendekatan model CIPP, pelaporan keuangan pada Pusat Penelitian Kebijakan

Pendidikan dan Kebudayaan secara umum sudah dijalankan dengan baik tetapi ada hal khusus yang perlu diperbaiki terkait dengan sistem kerja pada proses pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

**SARAN**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa masalah pengelolaan dan pencatatan keuangan dan BMN dalam pelaporan keuangan di Puslitjakdikbud adalah kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan maka perlu yang dilakukan adalah menyusun strategi untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan pelaporan keuangan, yang melibatkan antara lain Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, verifikator data keuangan, dan para operator aplikasi keuangan dalam melaksanakan tugas sehingga permasalahan yang muncul baik dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan dan Barang Milik Negara bisa diselesaikan secara bersama-sama dan permasalahan tersebut tidak berulang secara terus menerus. Koordinasi dilaksanakan secara periodik melalui rapat mingguan atau bulanan.
2. Hasil evaluasi input menunjukkan bahwa pegawai yang bertugas dalam pelaporan keuangan sudah kompeten dalam menjalankan aplikasi keuangan. Tetapi pada pelaksanaannya, hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa masih ditemukannya pegawai yang belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, perlu melakukan evaluasi kinerja individu untuk meningkatkan kualitas kerja yang dihasilkan setiap pegawai di luar penilaian melalui sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan cara memantau cara kerja dan disiplin pegawai keuangan. Evaluasi dilaksanakan secara periodik triwulan ataupun semester yang dilakukan oleh Kepala subbagian Tata Usaha terhadap proses bisnis yang dilaksanakan oleh setiap pegawai keuangan. Hasil evaluasi berupa laporan penilaian dan instruksi perbaikan apabila terdapat kesalahan serta memantau perbaikan yang dilaksanakan pegawai tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Setyabudi, Oktariawan. 2018. *Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Berbasis Akrual*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Wirawan. 2016. *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Kota Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kemendikbud

Laporan Keuangan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2018